

PERAN INDONESIA DALAM MENGETUAI ASEAN WORKING GROUP ON CHEMICAL AND WASTE TAHUN 2022-2025

Annisa Rayhana Amalia¹, Enny Fathurachmi²✉

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author efathurachmi@gmail.com

Article history

Received 2026-03-12 | Accepted 2026-03-13 | Published 2026-06-30

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Indonesia dalam mengetuai ASEAN Working Group on Chemical and Waste tahun 2022-2025. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan peran Indonesia dalam ASEAN Working Group on Chemical and Waste tahun 2022-2025 sebagai ketua yang dilihat dari konsep regionalisme dan birokrasi. Penelitian ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data library research yaitu mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan melalui buku, jurnal, artikel, dan internet. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data kualitatif yang mengkonstruksikan dan menganalisis data untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan di bawah kepemimpinan Indonesia, AWG-CW kemudian dijalankan dengan menunjukkan disiplin prosedural yang kuat dan koherensi lintas sektoral. Model kepemimpinan Indonesia pada masa kepemimpinannya menekankan pada beberapa poin seperti penyelarasan inisiatif regional dengan kerangka hukum nasional tentang pengelolaan bahan kimia dan limbah dan koordinasi antara sekretariat ASEAN untuk menghindari adanya regulasi yang saling bertolak.

Kata Kunci: ASEAN, AWG-CW, Indonesia, Peran Kepemimpinan, Sampah Kimia dan Limbah, Regionalisme, Birokrasi

INDONESIA'S ROLE IN CHAIRING ASEAN WORKING GROUP ON CHEMICAL AND WASTE IN 2022-2025

Abstract

This study aims to describe Indonesia's role in chairing the ASEAN Working Group on Chemicals and Waste from 2022 to 2025. This study is designed to describe Indonesia's role in the ASEAN Working Group on Chemicals and Waste from 2022 to 2025 as chair, viewed from the perspective of regionalism and bureaucracy. This research is qualitative descriptive writing using library research data collection techniques, namely collecting necessary data and information from books, journals, articles, and the internet. The type of data used is secondary data, with qualitative data analysis techniques that construct and analyze the data to obtain research results. The results of this study indicate that under Indonesia's leadership, the AWG-CW was implemented with strong procedural discipline and crosssectoral coherence. Indonesia's leadership model during its tenure emphasized several points, such as aligning regional initiatives with the national legal framework on chemical and waste management and coordination between ASEAN secretariats to avoid conflicting regulations.

Keywords: ASEAN, AWG-CW, Indonesia, Leadership Role, Chemicals and Waste, Regionalism, Bureaucracy.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Annisa Rayhana Amalia, Enny Fathurachmi

1. PENDAHULUAN

Masalah pengelolaan bahan kimia dan limbah menjadi isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Menurut data WHO (*World Health Organization*), paparan terhadap bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, mulai dari gangguan pernapasan hingga kanker. Meningkatnya jumlah sampah dan kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan yang ramah lingkungan, khususnya sampah elektronik, kantong plastik, dan sampah makanan, menimbulkan tantangan serius bagi sebagian besar negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Berbagai jenis sampah sering kali bercampur sehingga pengelolaannya tidak ramah lingkungan.

Pada tahun 2012, ASEAN menghasilkan 202.000 ton sampah padat kota per hari dan jumlah ini diprediksi akan berlipat ganda pada tahun 2025 (World Bank, 2018). Rata-rata sampah padat kota yang dihasilkan pada tahun 2012 adalah 1,03 kilogram per orang per hari, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1,38 kilogram per orang per hari pada tahun 2025. Selain itu, empat dari lima negara teratas yang menyumbang 60 persen sampah plastik laut berasal dari ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Sistem pengelolaan sampah di ASEAN telah dipisahkan menjadi tiga jenis sampah yaitu Sampah Padat Kota (*Municipal Solid Waste*), Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste*) dan Sampah Elektronik (*E-Waste*). Sampah padat yang dihasilkan di ASEAN umumnya terdiri dari sampah organik, plastik, kertas, kaca, logam, tekstil, karet, rumput/kayu, puing konstruksi, dan lain-lain. Berikut ini adalah data komposisi sampah padat di negara-negara ASEAN pada tahun 2014.

Tabel 1. Komposisi sampah padat kota di negara-negara ASEAN dalam persen

Negara	Organik	Kertas	Plastik	Logam	Kaca	Tekstil	Karet	Rumput/Kayu	Puing Bangunan	Dan lain-lain
Brunei Darussalam	36	18	16	4	3	1	0	0	0	0
Kamboja	60	9	15	0	3	1	1	0	0	0
Malaysia	45	8,2	13,2	0	3,3	0	0	0	0	27,3
Myanmar	73	2,24	17,75	0	0,45	1,14	0	0	0	3,13
Filipina	52	8,7	10,55	14,6	2,34	1,61	0	0	0	0
Singapura	10,5	16,5	11,6	20,8	1,1	2,1	0	8,6	17	11,9
Thailand	64	8	17,26	2	3	1,4	1	1	0	0
Vietnam	55	5	10	5	3	0	4	0	0	0
Indonesia	60	9	14	4,3	17	3,5	6	0	0	24
Laos	64	7	12	1	7	5	3	0	0	0

Sumber: United Nations Environment Programme

Selain itu, penggunaan pestisida yang terus berlanjut terutama di bidang pertanian, beberapa di antaranya sangat beracun dan dilarang di tempat lain, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan bahan kimia. Secara umum, terdapat kekurangan informasi mendasar tentang penggunaan dan distribusi bahan kimia di negara-negara tersebut dan bahan kimia sering dibuang tanpa informasi atau kesadaran yang memadai tentang kapan dan bagaimana membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan.

Berdasarkan data tersebut, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan limbah dan lingkungan, khususnya terkait penggunaan pestisida yang intensif dengan pengendalian yang belum memadai di sektor pertanian, serta keterbatasan infrastruktur legislatif, kelembagaan, dan kapasitas pengelolaan limbah kimia yang ramah lingkungan. Meskipun berbagai kerangka kebijakan, regulasi, dan strategi mengenai green growth, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim telah dikembangkan, tantangan-tantangan ini masih persisten. Oleh karena

itu, sepuluh negara anggota ASEAN berkomitmen memperkuat kerja sama regional melalui pembentukan *ASEAN Working Group on Chemical and Waste* (AWG-CW) pada tahun 2015 di bawah ASOEN, sebagai upaya memfasilitasi pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya secara berkelanjutan guna melindungi lingkungan dan kesehatan di kawasan.

Saat pertemuan ke-33 AWG-CW pada Oktober 2022 di Kamboja, Indonesia diketahui ditunjuk menjadi Ketua AWG-CW periode 2022-2025 (KLHK, 2022). Sebagai Ketua AWG-CW, Indonesia diharapkan memainkan peran strategis dalam memperkuat komitmen ASEAN untuk mengurangi dampak bahan kimia dan limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, sejalan dengan komitmennya terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya tantangan akibat pertumbuhan limbah plastik dan limbah berbahaya yang dipicu oleh ekspansi industri, konsumerisme, dan urbanisasi yang pesat, Indonesia telah mengembangkan berbagai kerangka kebijakan untuk menekan dampak tersebut. Dalam konteks ini, AWG-CW menjadi wadah penting bagi penguatan kebijakan regional yang bertujuan mengurangi produksi limbah berbahaya serta meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di kawasan ASEAN.

Penulis ingin mengetahui serta memahami sejauh mana kepemimpinan Indonesia mampu mendorong kerja sama kawasan serta kontribusinya dalam membentuk arah kebijakan lingkungan di tingkat ASEAN. Maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada Bagaimana peran Indonesia dalam mengetuai ASEAN Working

Group on Chemical and Waste tahun 2022-2025?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan utama untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, khususnya mengenai peran Indonesia dalam mengetuai ASEAN Working Group on Chemical and Waste. Penelitian deskriptif berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang situasi, kejadian, atau kondisi yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Indonesia Dalam Mengetuai ASEAN Working Group on Chemical and Waste Tahun 2022-2025

Pembentukan AWG-CW dilatarbelakangi oleh kekhawatiran global yang semakin meningkat mengenai dampak negatif bahan kimia dan limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan (VietnamPlus, 2023). Pada tahun 2015, Pejabat Senior ASEAN Bidang Lingkungan Hidup (ASOEN) memutuskan untuk mereformasi *ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements* (AWGMEA) menjadi *ASEAN Working Group on Chemicals and Waste* (AWG-CW) (ASEAN Cooperation on Environment, 2025). Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas kerja sama regional dalam pengelolaan bahan kimia dan limbah.

Tujuan utama dari AWG-CW adalah meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan bahan kimia dan limbah. Ini mencakup implementasi konvensi internasional seperti Basel, Rotterdam, Stockholm, dan Minamata, serta Protokol Montreal. Setiap tahun, AWG-CW menyelenggarakan pertemuan untuk membahas dan mengkoordinasikan implementasi Rencana Aksi AWG-CW. Rencana ini terdiri atas tujuh program utama yang berfokus pada pengelolaan bahan kimia dan limbah yang berwawasan lingkungan (ERIA, 2023).

Pertemuan AWG-CW berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bertukar pengalaman, memperbarui informasi mengenai kebijakan dan teknologi terkini, serta meningkatkan kapasitas nasional dalam manajemen bahan kimia dan limbah (VietnamPlus, 2023). Pertemuan AWG-CW juga kerap membahas isu-isu utama seperti, pembaruan keputusan-

keputusan dari pertemuan dalam kerangka ASEAN, implementasi rencana kerja kelompok, serta inisiatif lintas sektor yang berkaitan dengan bahan kimia dan limbah.

Dalam menjalankan program-programnya, AWG-CW menetapkan negara anggota sebagai "lead country" atau ketua untuk program atau kegiatan spesifik. Adapun mekanisme penunjukkan ketua ini biasanya dilakukan dengan mengadakan sistem rotasi yang bisa dilakukan sesuai urutan abjad negara ataupun diakui oleh seluruh negara ASEAN (IGES, 2015). Negara yang ditunjuk ini bertanggung jawab dalam menyusun proposal, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaporkan kemajuan kepada forum AWG-CW serta Sekretariat ASEAN (ASEAN Environment Knowledge Hub, 2022).

Peran Indonesia Sebagai Ketua AWG-CW Tahun 2022-2025

Indonesia telah secara resmi dipercaya untuk memimpin AWG-CW periode 2022-2025 (Media Indonesia, 2022). Penunjukan ini menunjukkan komitmen dan peran penting Indonesia dalam memajukan kerja sama lingkungan hidup di wilayah Asia Tenggara (Wanaloka Media, 2022). Keputusan ini berasal dari Pertemuan ke-33 Pejabat Senior ASOEN pada Oktober 2022. Pertemuan tersebut tidak hanya menunjuk ketua AWG-CW, tetapi juga menyepakati beberapa agenda penting terkait perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan di kawasan ASEAN.

Dalam perspektif birokrasi Weberian, AWG-CW beroperasi melalui struktur hierarkis dan pembagian kerja yang jelas, tercermin dalam rantai komando serta pembagian tugas spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kerangka ini, Indonesia sebagai ketua AWG-CW memikul tanggung jawab utama dalam perumusan dan pelaksanaan rencana kerja, termasuk koordinasi program-program yang tercantum dalam AWG-CW Action Plan, sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan bahan kimia dan limbah melalui kepemimpinan dan inisiatif peningkatan kapasitas di tingkat regional.

Dalam konsep birokrasi oleh Weber juga, dikatakan bahwa birokrasi modern bekerja berdasarkan otoritas rasional-legal, yang salah satu prinsip utamanya adalah prinsip terkait Aturan dan Peraturan Formal. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan dalam birokrasi bersumber dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, prosedur baku, dan pedoman resmi yang mengatur bagaimana organisasi dijalankan. Berdasarkan prinsip tersebut, kepemimpinan Indonesia di AWG-CW dipahami sebagai kepemimpinan administratif yang dijalankan melalui pengelolaan prosedur dan mekanisme institusional, bukan melalui pengaruh personal atau persuasi politik.

Dalam praktiknya, delegasi Indonesia berfokus pada penyusunan, penyelarasan, dan pelaksanaan pedoman kerja, standar teknis, serta dokumen kebijakan yang telah disepakati dalam kerangka ASEAN. Pendekatan ini terlihat dari upaya Indonesia dalam mendorong harmonisasi kebijakan, penyelarasan standar teknis, serta peningkatan kapasitas administratif negara-negara anggota dalam pengelolaan bahan kimia berbahaya dan limbah di tingkat regional maupun internasional (ASEAN Cooperation on Environment, 2025).

Selain daripada itu terdapat berbagai kegiatan strategis yang telah dilaksanakan selama masa kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua AWG-CW periode 2022-2025. Kegiatan tersebut meliputi rapat koordinasi, lokakarya teknis, serta inisiasi kebijakan regional. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengelolaan bahan kimia berbahaya dan limbah di kawasan ASEAN, sekaligus mendukung harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas negara anggota. Di bawah kepemimpinan Indonesia, AWG-CW telah secara aktif memperkuat rasionalitas prosedural. Yang dimana dalam konsep birokrasi Weber, yaitu, pengambilan keputusan yang diatur oleh aturan, didasarkan pada bukti, dan selaras dengan standar internasional.

Dengan demikian, dibawah pimpinan Indonesia, AWG-CW menempatkan dirinya sebagai perpanjangan dari sistem tata kelola lingkungan global, mengintegrasikan tindakan ASEAN ke dalam kerangka regulasi multilateral yang formal dan hukum. Penyelarasan ini mencerminkan dinamika Weberian yang khas: rasionalitas birokrasi yang berakar pada norma internasional yang terkodifikasi, memastikan kepastian, keseragaman prosedural, dan legitimasi.

Dalam perannya di tingkat regional, Peran Indonesia kemudian dapat dilihat menggunakan teori regionalisme. Hal ini dapat dilihat dari upaya kolektif dalam menangani isu-isu transnasional. Negara-negara anggota ASEAN, melalui forum AWG-CW, berupaya mengatasi dampak lintas batas dari polusi bahan kimia berbahaya, limbah plastik, dan limbah elektronik (Iksan, 2022). Kerjasama ini melibatkan adopsi kebijakan bersama, harmonisasi regulasi, serta pertukaran informasi dan teknologi terkait pengelolaan limbah dan bahan kimia berbahaya, yang mencerminkan karakteristik soft regionalism ASEAN yang didasarkan pada konsensus, dialog, dan saling pengertian (Ningrum dan Rifawan, 2025; ASEAN Secretariat, 2016).

Seperti yang telah diketahui, regionalisme ASEAN mengedepankan esensi kolaborasi antar negara berdasarkan kedekatan geografis, keselarasan kepentingan, serta dedikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kedaulatan dan prinsip non-intervensi masing-masing negara anggota (Utami dkk, 2024; ASEAN Secretariat, 2016). Hal ini kemudian diwujudkan dalam ASEAN Joint Declaration on Hazardous Chemicals and Wastes Management. Deklarasi ini menekankan komitmen bersama negara-negara anggota untuk memperkuat tata kelola bahan kimia dan limbah yang ramah lingkungan, meningkatkan kapasitas, serta mendorong transfer teknologi dan pertukaran informasi. Hal ini menjadi dasar penting untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat kerja sama regional dalam menangani tantangan limbah berbahaya dan perdagangan limbah ilegal lintas batas (Iksan, 2022; Ningrum dan Rifawan, 2024).

Sebagai Ketua AWG-CW periode 2022–2025, Indonesia kemudian juga berfokus pada agenda prioritas strategis guna memperkuat tata kelola bahan kimia berbahaya dan limbah di Asia Tenggara. Program-program yang diusung bertujuan untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat data limbah, serta mengendalikan bahan kimia berbahaya secara efektif dan berkelanjutan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prioritas utama Indonesia berfokus pada harmonisasi regulasi bahan kimia dan limbah. Indonesia juga turut memprioritaskan penguatan sistem data dan informasi limbah. Ketersediaan data yang akurat dan terkini terkait produksi, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia serta limbah berbahaya sangat esensial untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan kebijakan yang efektif. Indonesia turut mengintegrasikan agenda AWG-CW dengan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui implementasi prinsip 3R dan pengembangan ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik dan limbah berbahaya lainnya.

Program prioritas ini selaras dengan Rencana Aksi Change AWG-CW 2019–2025, sekaligus mendukung target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim (ASEAN Environment Knowledge Hub, 2022). Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penggunaan konsep regionalisme menunjukkan bahwa peran Indonesia sebagai Ketua AWG-CW bukan hanya sebagai rotasi jabatan akan tetapi juga alat untuk mempeluars kepentingan nasional melalui tindakan kolektif dan untuk memaksimalkan pengaruh politik dan diplomatik Indonesia.

Kontribusi Indonesia dalam Isu Kimia dan Limbah di ASEAN

Pada lingkup regional, Indonesia secara aktif mengambil peran sebagai pemimpin koordinasi ASEAN dalam upaya penanganan polusi plastik laut melalui beragam forum. Pada Oktober 2023, Indonesia selaku Koordinator Nasional ASEAN untuk isu lingkungan, memimpin Pertemuan Koordinasi ASEAN mengenai Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC) Polusi Plastik. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan pandangan dan memperkuat kerja sama dalam mengatasi polusi plastik. Langkah ini konsisten dengan Regional Action Plan to tackle Plastic Pollution (2021–2025) yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan rancangan awal International Legally Binding Instrument (ILBI) on Plastic Pollution (Kementerian LHK RI, 2023).

Indonesia secara aktif menyelenggarakan berbagai konferensi dan lokakarya tingkat ASEAN, contohnya yaitu ASEAN Conference on Combating Plastic Pollution (ACPP) 2023 (KEMENKO MARVES RI, 2022). Konferensi ini menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan

strategi dalam mengurangi sampah plastik di kawasan. Pada kesempatan tersebut, Indonesia mengundang negara-negara ASEAN untuk memperkuat komitmen bersama, mempercepat implementasi The Asean Regional Action Plan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan industri, masyarakat, dan lembaga donor (KEMENKO MARVES RI, 2022).

Selain dari penyelenggaraan konferensi dan lokakarya, Indonesia juga berhasil dalam mengembangkan pengimplentasian The Asean Regional Plan dalam mengatasi permasalahan sampah laut. Hal ini kemudian dilihat dari beberapa negara ASEAN yang mulai mengimplementasikan maupun mengembangkan beberapa kebijakan terkait sampah laut.

Selama masa kepemimpinan AWG-CW periode 2022–2025, Indonesia secara aktif dan strategis menjalankan berbagai bentuk diplomasi (Hendar dkk, 2022). Diplomasi ini berfokus pada negosiasi, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama lintas negara, menjadikannya instrumen utama dalam memperkuat kerja sama regional untuk pengelolaan bahan kimia berbahaya dan limbah yang berkelanjutan di Asia Tenggara (Hendar dkk, 2022; Biro Kerja Sama Luar Negeri KLHK RI, 2022). Dalam lingkup diplomasi, Indonesia secara proaktif memperkuat posisi ASEAN sebagai entitas tunggal dalam menghadapi dinamika geopolitik dan tantangan global (Frishanti, 2025). Indonesia menegaskan sentralitas ASEAN sebagai platform fundamental dalam pengelolaan isu lingkungan dan perdagangan bahan kimia.

4. KESIMPULAN

Selama periode 2022-2025, Indonesia sukses memimpin AWG-CW, memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam kerja sama regional pengelolaan bahan kimia berbahaya dan limbah di Asia Tenggara. Dalam peran Indonesia sebagai ketua, Indonesia tidak hanya memfasilitasi konsensus dan harmonisasi regulasi akan tetapi juga aktif mendorong adopsi kebijakan baru. Kepemimpinan Indonesia dinilai telah membangun kepercayaan, memperkuat kapasitas institusional, dan mendorong kolaborasi multisektoral antarnegara anggota ASEAN.

Kepemimpinan Indonesia di AWG-CW menunjukkan implementasi teori birokrasi melalui upaya aktif dalam negosiasi, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama antarnegara. Indonesia turut menerapkan pendekatan soft regionalisme khas ASEAN, di mana dalam hal ini ditunjukkan dengan program regional yang dilaksanakan secara sukarela dan fleksibel, namun tetap berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua AWG-CW periode 2022–2025 tidak hanya memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan lingkungan lintas batas akan tetapi juga menunjukkan ASEAN sebagai komunitas yang adaptif dan tanggap terhadap isu-isu lingkungan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Cooperation on Environment. (2025). Chemicals and Waste About. Tersedia di <https://environment.asean.org/chemical-and-waste/about>
- ASEAN Environment Knowledge Hub. (2022). AWGCW Action Plan. Tersedia di https://environment.asean.org/public/uploads/working_groups/20220627-3.-AWGCW-Action-Plan.pdf
- ASEAN Environment Knowledge Hub. (2023). 8th Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW). Tersedia di <https://environment.asean.org/events/detail/8th-meeting-of-asean-workinggroup-on-chemicals-and-waste-awgcw>
- ERIA. (2023). Working Group Reaffirms ASEAN's Commitment to Implement Environmentally Sound Management of Chemicals and Waste. Tersedia di <https://rkcmpd-eria.org/news/working-group-reaffirms-asean-s-commitment-toimplement-environmentally-sound-management-of-chemicals-and-waste-2>
- Iksan, M. N. (2022). Analisis Kerja Sama ASEAN dalam Penanganan Limbah. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Tersedia di https://repository.unhas.ac.id/24129/2/E061181321_skripsi_06-07-2022%201-2.pdf

- Kementerian LHK RI. (2023). ASEAN Regional Workshop Langkah-Langkah ASEAN Tangani Sampah Plastik Laut Mendesak Dilakukan. Tersedia di <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7185/asean-regional-workshoplangkah-langkah-asean-tangani-sampah-plastik-laut-mendesak-dilakukan>
- Kementerian LHK RI. (2024). Indonesia Menyelenggarakan Lokakarya Kedua ASEAN Community-based Climate Action [Siaran Pers Nomor: SP. 151/HUMAS/PPIP/HMS.3/7/2024]. Tersedia di <https://www.menlhk.go.id/news/indonesia-menyelenggarakan-lokakarya-keduaasean-community-based-climate-action/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (KLHK). (2020). Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia. KLHK.
- Ningrum, C. A., & Rifawan, A. (2025). Peran ASEAN dalam Penguatan Kebijakan Extended Producer Responsibility di Indonesia melalui ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (2021-2025). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3933-3946.
- Nwangwu, Chikodiri & Enyiazu, Chukwuemeka & Nwagwu, Ejikeme & Ezeibe, Christian. (2019). Regionalism in World Politics: Interrogating the Relevance on the ECOWAS in Global Political Economy. *Central European Journal of International and Security Studies*. 13. 111-132.
- O'Neill, M. (1996). *The Politics of European Integration: A Reader*. Abingdon-onThames: Routledge. Secretariat.
- Sager, F., & Rosser, C. (2021, September 29). Weberian Bureaucracy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Retrieved 10 Nov. 2025, from <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-166>.
- Sridharan, M.A. (2022) Bureaucracy - Six Principles Of Max Weber [online]. Diakses dari <https://thinkinsights.net/strategy/bureaucracy-six-principles-max-weber>
- VietnamPlus. (2023). Eighth ASEAN Working Group on Chemicals and Waste meeting opens in Hanoi Tersedia di <https://en.vietnamplus.vn/eighth-aseanworking-group-on-chemicals-and-waste-meeting-opens-in-hanoipost255774.vnp>
- Wanaloka. (2022). Indonesia Jadi Ketua Pokja ASEAN tentang Bahan Kimia dan Sampah 2022-2025. Tersedia di <https://wanaloka.com/indonesia-jadi-ketupokja-asean-tentang-bahan-kimia-dan-sampah-2022-2025/>
- World Bank. (2020). *Managing Industrial and Hazardous Waste in Southeast Asia*.
- Wunderlich, J.-U. (2008). *Regionalism, Globalisation and International Order: Europe and Southeast Asia* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315604459>